

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mensejahterakan masyarakat telah dilakukan melalui banyak hal oleh pemerintah, termasuk salah satunya dengan program memberdayakan masyarakat itu sendiri melalui aspek pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga harapannya dengan upaya pemberdayaan tersebut mampu mengentaskan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal itu mengingat penduduk miskin di Indonesia termasuk dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai 60% penduduk berada dibawah garis kemiskinan¹. Tapi yang terjadi upaya pemberian bantuan pemerintah tersebut terkadang masih kurang tepat sasaran dikarenakan belum adanya identifikasi potensi di masyarakat itu sendiri sebelum memberikan bantuan, sehingga bantuan yang diterima masyarakat dan juga respon kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri belum dilandasi oleh keberadaan potensi yang mereka miliki.

Terdapat tiga hal yang menjadi indikator kesejahteraan suatu masyarakat menurut Bambang Suprayitno yaitu: Pertama Adanya pemerataan pendapatan yang berarti bahwa pendapatan suatu negara atau kelompok masyarakat hampir bisa dikatakan merata bagi semua orang atau tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Hal ini tentu berkaitan dengan tersedianya lapangan kerja, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua Pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua pihak dan kalangan, baik itu tingkat dasar maupun untuk pendidikan tinggi. Pemerintah diharuskan mampu memberikan fasilitas pendidikan yang murah tapi juga berkualitas bagi semua lapisan

¹ Poerwoko Soebiyanto, Pemeberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik(Bandung;Alfabeta,2012) hlm. 25

masyarakat, sehingga dampaknya kualitas pengetahuan masyarakat akan tinggi dan berdaya saing sumber daya manusiannya dengan negara lain. Ketiga tentang Kualitas kesehatan yang meningkat dan harapan hidup yang tinggi. Kesehatan merupakan faktor penting yang menunjang kesejahteraan masyarakat, karena tanpa kesehatan yang bagus tidak akan tercapai apapun keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan apabila masih banyak terdapat keluhan di masyarakat tentang gangguan kesehatan dan wabah penyakit, maka negara dianggap belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakatnya.²

Untuk kondisi di Indonesia saat ini kesenjangan pendapatan yang ada masih tergolong tinggi, dan menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menargetkan angka ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia bisa terus ditekan pada tahun 2018. Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target rasio gini, indikator ketimpangan pendapatan, bisa ditekan ke level 0,38, dari angka 0,393 per bulan pada Maret tahun 2017.³ Rasio gini memiliki rentang 0 untuk pemerataan sempurna dan 1 untuk ketimpangan sempurna, dimana semakin rendah angka rasio gini, maka angka pemerataan pendapatan penduduk akan semakin membaik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini pada bulan September tahun 2017 mencapai 0,391. Angkanya turun tipis jika dibandingkan pada bulan Maret tahun 2017 yang sebesar 0,393. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan ketimpangan memang bukan hal mudah karena membutuhkan roadmap jangka panjang.⁴ Dan untuk mencapai angka ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk

² Bambang Suprayitno, *Ekonomi Publik Konsep dan Implikasi Kebijakan*, (Yogyakarta; UPP Stim YKPN 2017) hlm.42

³ Bambang Brodjonegoro, Bappenas: Sangat Tak Mudah Menekan Rasio Gini 0,01, dalam <https://pemeriksaanpajak.com/2017/12/19/bappenas-sangat-tak-mudah-menekan-rasio-gini-001/> diakses pada 2 Februari 2018.

⁴ Suhariyanto, BPS Jelaskan Penyebab Rasio Gini Turun Tipis, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1046814/bps-jelaskan-penyebab-rasio-gini-turun-tipis> diakses pada 2 Februari 2018

menanggulangnya. Untuk ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin, campur tangan pemerintah diperlukan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem, terutama yang berada di pedesaan dan pinggiran kota, sehingga akan terjadi pemerataan pendapatan.

Campur tangan pemerintah dilakukan diantaranya melalui penyaluran subsidi tepat sasaran, terutama untuk subsidi barang kebutuhan pokok konsumsi rumah tangga sehari-hari bagi 40 (empat puluh) persen masyarakat berpendapatan terendah. Jika konsumsi masyarakat tersebut naik, akan otomatis berpengaruh pada perputaran roda ekonomi Nasional secara menyeluruh, menggerakkan sektor riil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan dan pemerataan untuk masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Cita-cita dan semangat undang-undang nomor 06 Tahun 2014 adalah untuk perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan asas utama rekognisi dan subsidiaritas.

Perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia bertujuan agar desa nantinya dapat menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan komitmen koordinasi yang sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di pedesaan Indonesia yang menurut Badan pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, dari 255 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, sebanyak 119 juta jiwa (46,7%) penduduk Indonesia hidup di desa. Maka dari itu desa memiliki peranan penting untuk memulai kesejahteraan sosial.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa telah merubah karakteristik desa yang sebelumnya kurang diperhatikan, saat ini berubah menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan. Karena sebelum adanya undang-undang desa tersebut, kewenangan yang dimiliki desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sangatlah terbatas, karena desa tidak lebih dari kepanjangan tangan dari pemerintahan Kabupaten yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten. Dengan adanya undang-undang desa tersebut telah diikuti dengan mulainya pencairan dana desa ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Banyak daerah yang mencoba mengadopsi strategi-strategi sukses yang dilakukan oleh daerah lainnya, tetapi tidak sepenuhnya berhasil, hal itu dikarenakan penerapan strategi yang dilakukan tanpa dilandasi dengan menemukenali potensi lokal yang ada di wilayahnya terlebih dahulu. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Boediarso Teguh Widodo, terdapat 44 (empat puluh empat) desa yang tersebar di 9 (sembilan) daerah di Indonesia dianggap gagal melakukan penyerapan dana desa tahap I⁵. Hal itu berakibat pada pencairan jatah dana mereka tahap ke II yang dibuka pada pekan kedua bulan Agustus tahun 2017 yang lalu tidak bisa dicairkan.

Kurangnya kemampuan untuk menemukenali potensi yang ada yang bisa dikembangkan dalam membangun desanya. Serta adanya hambatan yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni yang ada untuk membangun desanya dan juga urbanisasi dari desa ke kota masih menjadi kendala perkembangan dan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Daya Tarik kota baik itu sebagai tempat menempuh pendidikan bagi generasi muda dan juga tempat untuk

⁵ Boediarso Teguh Widodo, 44 Desa Gagal Salurkan Dana Desa, dalam <http://infobanknews.com/44-desa-gagal-salurkan-dana-desa/> di akses pada 3 Februari 2018

mencoba mencari kerja menjadi tantangan bagi desa untuk berusaha bersaing dan tampil menarik terutama bagi generasi muda desa .

Terdapat dua azas yang menjadi wewenang desa berdasarkan undang-undang desa tersebut yang dikembalikan kewenangannya kepada desa yaitu azas rekognisi yang merupakan pengakuan dari pemerintah pusat apa yang menjadi hak asal usul desa. Dimana Desa sudah memiliki hak-hak tersebut sejak dulu bahkan sebelum Republik Indonesia ini di deklarasikan, contoh yaitu pemilihan kepala desa, gotong royong dan adat istiadat desa. Yang kedua yaitu azas subsidiaritas yang berarti desa bukan hanya menerima mandat dari Pemerintah Kabupaten, tapi desa berhak menyelenggarakan kewenangan tersebut tanpa menunggu pelimpahan dari Pemerintahan Kabupaten, contohnya adalah pelaporan untuk pemotongan hewan yang tidak bisa dipantau secara menyeluruh oleh Kabupaten, maka hal itu diserahkan kepada desa⁶.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal penting yang menjadi amanat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam memajukan perkembangan desa setelah turunnya undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tersebut yaitu⁷ pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemasyarakatan. Untuk itu sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang mampu mendukung pertumbuhan wilayah desa tersebut harus memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar memiliki daya saing dan semangat yang mumpuni serta tekad yang kuat untuk turut serta dalam pembangunan di desanya.

Salah satu kota yang menarik untuk dibahas tentang pemberdayaan masyarakat, potensi daerah dan potensi desanya adalah Kabupaten Malang, yang merupakan ikon wisata dan kota kedua di Jawa Timur setelah Ibukota Propinsi Jawa Timur Surabaya. Menariknya membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan potensi daerah di

⁶ Rusnadi Padjung, Desa; Bukan Sekedar Pemerintahan Lokal, Pusat Data dan Studi Kemendesa, (Jakarta; Info Desa Edisi Oktober 2016) hlm.26

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB Penjelasan

Kabupaten Malang adalah karena “Malang” seolah-olah tiada habisnya untuk dibahas dan dibicarakan atau dituliskan potensinya. Hal itu dikarenakan di Kabupaten Malang selalu ada yang baru baik dari sisi pengembangan potensi tujuan wisatanya, wisata kulinernya dengan makanan-makanan khas daerahnya, dan juga flora fauna serta tradisi pengelolaan seni budayanya.

Kabupaten Malang terletak pada 112° 03'5" 10090" sampai 112° 57'00" Bujur Timur, serta 7044'55011" sampai 8026'35045" Lintang Selatan. Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang yang berada tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri terletak di sebelah barat, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu terletak di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang di sebelah timur, serta Samudra Hindia atau pantai selatan di sebelah selatan.

Tabel 1.1 Batas Wilayah Kabupaten Malang

Utara	Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu
Selatan	Pantai selatan atau Samudra Hindia
Barat	Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Timur	Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo

Sumber : Informasi Desa

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Timur dan sungai terpanjang kedua di pulau Jawa setelah Bengawan Solo.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan diantara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten
Malang Propinsi
Jawa Timur



Sumber : Website infokepanjen.com

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel, yang merupakan potensi khas Kabupaten Malang, Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan untuk ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak, buah naga dan semangka. Selain perkebunan teh di beberapa daerah, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi, dan coklat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudan Dampit). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.⁸

Salah satu potensi desa di Kabupaten Malang adalah desa Sengguruh, dimana Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur saat ini⁹ masih terdapat potensi yang belum

⁸ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang#Ekonomi, diakses 31 Juli 2018

⁹ RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Sengguruh, Tahun 2013-2019, hal.16

dimanfaatkan secara maksimal untuk kemaslahatan seluruh masyarakat desa, diantaranya banyak tenaga potensial yang ada di desa belum diajak dan diberdayakan secara utuh untuk turut serta membangun desa. Banyaknya pemuda desa yang memiliki pendidikan tinggi yang seharusnya bisa dijadikan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga belum dilakukan secara maksimal.

Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang perlu mendapatkan jenis-jenis pelatihan dan pengembangan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penelusuran kebutuhan dan pemetaan sumberdaya berbasis potensi di Desa Sengguruh memerlukan strategi yang tepat untuk menentukan jenis pelatihan, pembangunan, dan inovasi sosial sesuai potensi dari desa itu sendiri. Diselenggarakannya penelitian Pemberdayaan Potensi Desa di Desa Sengguruh agar terpilih kecakapan-kecakapan pelatihan yang dibutuhkan masyarakat sehingga didapatkan daftar prioritas kebutuhan masyarakat, agenda pembangunan, serta untuk mendukung program dan pengembangan wilayah yang diperlukan untuk inovasi sosial yang nantinya dapat menopang ketahanan ekonomi daerah.

Sarana Prasarana Ekonomi Desa yang saat ini sudah ada diantaranya adalah : Pasar Desa, Kelompok simpan pinjam, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), serta semua akses jalan beraspal sebagai sarana perhubungan/ transportasi antar kampung.

Permasalahan secara umum yang ada di Desa Sengguruh saat ini adalah belum adanya pemetaan potensi, pada saat musim tanam banyak petani yang memerlukan pupuk dan saat ini mereka selalu membelinya ke kota, begitu juga di saat panen petani selalu didatangi tengkulak yang menawarkan harga panennya dengan harga yang murah. Peternak juga kesulitan menjual hasil ternaknya ke pasaran karena belum ada kelompok peternakan yang mengelola hasil peternakan yang dihasilkan oleh warga.

Masih kurangnya penanganan untuk pemasaran hasil panen maupun pengelolaan tanaman hasil pertanian dan ternaknya. Dengan adanya pasar desa, harusnya kegiatan perekonomian akan lebih maju bila pengelolaannya dilakukan secara maksimal, begitu juga dengan adanya SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang merupakan satu-satunya di wilayah Kecamatan Kepanjen selatan harusnya dapat menjadi magnet penggerak ekonomi desa, kenyataannya jumlah pengangguran di Desa Sengguruh cenderung masih tinggi, masih diatas 11% dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 4017 Jiwa.

Bertitik tolak dari fenomena yang diungkap dalam latar belakang, maka dapat dikemukakan pernyataan masalah (*problem statement*) sebagai berikut : belum teridentifikasinya potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh desa, dan belum adanya aplikasi jenis pelatihan yang sesuai kebutuhan masyarakat desa, pembangunan, dan inovasi sosial terhadap potensi wilayah setempat di desa Sengguruh. Oleh karena belum adanya analisis kebutuhan yang tepat berbasis potensi dari Desa Sengguruh itu sendiri yang saat ini sangat diperlukan, bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dengan Demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemetaan Potensi Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur).”**

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah menemukan potensi desa khususnya di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sehingga nantinya desa mampu merencanakan kegiatan pembangunan yang akan mendukung ketahanan ekonomi daerah.

1.2.2 Subfokus Penelitian

- 1.2.2.1 Penggalian potensi desa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
- 1.2.2.2 Pemberdayaan masyarakat Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan pemetaan skala prioritas dari potensi-potensi desanya
- 1.2.2.3 Potensi di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur berupaya menjadikan rencana pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian (*research question*) yang akan dijadikan dasar penelitian adalah :

1. Bagaimana Penggalian potensi desa dilakukan di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dapat dilaksanakan berorientasi dari potensi-potensi tersebut?
3. Bagaimana potensi di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dapat dijadikan rencana pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa Potensi Desa dalam mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah
2. Menganalisa potensi-potensi desa yang ada yang akan mendasari pemenuhan perencanaan pemberdayaan masyarakat dengan berlandaskan potensi yang dimiliki

3. Menganalisis potensi di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur yang dapat dijadikan rencana pembangunan sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat, khususnya mengenai implementasi penelusuran kebutuhan masyarakat apresiatif dan kajian ilmu penelusuran kebutuhan suatu kelompok masyarakat serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pembuat dan pengambil kebijakan di Universitas Pertahanan dan lingkup Kementerian Pertahanan serta Pemerintahan Desa Sengguruh, Pemerintahan Kecamatan Kepanjen dan Pemerintahan Kabupaten, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk membuat Kebijakan khususnya kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan Kemasyarakatan, serta semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan wilayah dan pengembangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa.